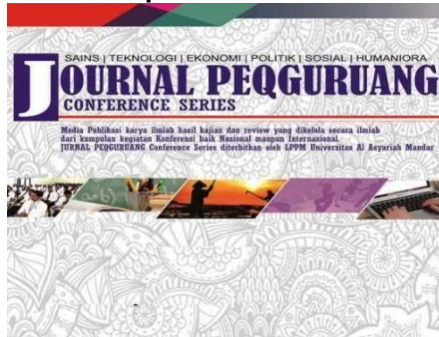


Graphical abstract



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL MELALUI UMKM DI DESA SALUMAKA.

¹*Sutrisman, ²Muhammad Syaeba, ³Hamdan.

¹Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author

Emailpenuliskorespondensi@gmail.com

Abstract

This investigate points to decide the part of town government in neighborhood financial advancement through MSMEs in Salumaka town. This investigate is subjective investigate with a graphic approach. The information sources for this overview were 9 witnesses. Information was collected through perception, investigate and documentation. The investigation method utilized is subjective information examination, depictions and information gotten within the field from existing witnesses. Within the interviews conducted, it was concluded that in Salumaka town the government provided motivation to MSME performing artists and given back additionally guided MSME on-screen characters in running MSMEs within the town. Based on interviews, it was found that the government has not been ideal in getting to be a facilitator for MSMEs. The government's part as a mobilizer in creating MSMEs includes endeavors to mobilize and accumulate back from different parties to create MSMEs. Territorial governments can act as mobilizers by interfacing MSME performing artists with different sources of capital help, such as Smaller scale Commerce Beneficial Help (BPUM), help from CSR companies or budgetary educate, and People's Trade Credit (KUR). The government does not give capital help specifically, but makes a difference MSMEs to get help from different parties.

Keywords: Part, Advancement. UMKM and Town Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM di desa Salumaka”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penyelidikan ini adalah sembilan orang informan. Data dikumpulkan melalui observasi, penelitian dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, dan analisis data yang diperoleh di lapangan dari informan yang ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa di Desa Salumaka, pemerintah memberikan motivasi kepada pemangku UMKM, mendukung dan membimbing pemangku UMKM dalam mengelola UMKM di desa tersebut. Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa pemerintah belum mengambil langkah optimal dalam menjadi pemberdayaan UMKM. Peran pemerintah sebagai penggerak dalam pengembangan UMKM mencakup upaya menggerakkan dan menggalang dukungan dari berbagai pihak terhadap pengembangan UMKM. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai penggerak dengan menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai sumber dukungan permodalan, seperti dukungan produksi untuk usaha mikro (BPUM), bantuan dari perusahaan CSR atau lembaga kredit keuangan dan usaha (KUR) populer. Pemerintah tidak memberikan dukungan permodalan secara langsung, namun membantu UMKM mendapat dukungan dari banyak pihak.

Kata Kunci : Peran pembangunan, UMKM dan perangkat desa.

Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5672

Received : 2024-07-29 | Received in revised form : 2024-11-29 | Accepted : 2024-11-29

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberdayakan masyarakat untuk menjamin taraf hidupnya dan tentunya pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa karena pada hakikatnya masyarakatlah yang mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana melakukannya. maka kita dapat mengatakan bahwa ini adalah komunitas yang berkembang. (Novitasari, 2022).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka pemerintah desa maupun masyarakat itu sendiri harus sadar dan berkepentingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. (Diaz et al., 2019).

Menghadapi keadaan tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan otonomi Desa dengan lebih memperhatikan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan karakter Desa. Atas dasar itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 yang dengan jelas menyatakan bahwa otonomi desa adalah kewenangan desa otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas kepentingannya. inisiatif sendiri, berdasarkan keinginan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya mendorong pembangunan desa untuk meningkatkan dan meningkatkan taraf hidup dan kondisi sosial masyarakat desa, yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan peran serta tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat desa. Menyadarkan masyarakat desa akan pentingnya upaya pembangunan sebagai sarana perbaikan kondisi sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sangat bergantung pada kapasitas pemimpin desa, khususnya kepemimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa. Karena pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa menjalankan peran kepemimpinan pemerintahan desa, merupakan orang yang mengarahkan dan melaksanakan pembangunan desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat di desa desa untuk ikut serta dalam pembangunan dan pembangunan desa. pembangunan desa. mengembangkan. (Komalasari et al., 2022).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan perekonomian berupaya mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah untuk menunjang perekonomian nasional, baik sebagai penyedia lapangan kerja, Bisnis sekaligus sumber uang.

Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh usaha kecil adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu perusahaan ditentukan oleh wirausahawan yang bergerak cepat dan memiliki basis pengetahuan dimana kecepatan, pergerakan dan inovasi adalah jantung dari kesuksesan. Wirausahawan adalah orang yang kreatif, inovatif, mampu menangkap peluang

usaha dan mempunyai visi pengembangan usaha. (Hidayah et al., 2019).

Pembangunan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah tingkat masyarakat. Jika hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian setiap desa tidak akan setara. Desa yang memiliki fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan sumber daya yang berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan desa terpencil yang tidak memiliki infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat. Jika tidak dilakukan tindakan apa pun, situasi ini akan menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Peran pemerintah desa diperlukan untuk memantau keadaan di setiap desa dan memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada di berbagai bidang. (Salam & Prathama, 2022).

Desa-desa yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan organisasi lokal lainnya untuk memulai strategi dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan akan rentan terhadap pemotongan keuangan di desa. Kenyataannya, pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa masih belum optimal, karena kita tahu bahwa modal yang tersedia dapat mendukung atau menghambat pembangunan. Terbatasnya ketersediaan modal berdampak pada pembangunan ekonomi yang dicapai. (Ondang et al., 2019).

Perekonomian Lokal Merujuk pada semua kegiatan ekonomi yang dilakukan pada tingkat lokal, seperti di desa atau komunitas di suatu wilayah tertentu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian lokal dengan meningkatkan produksi, konsumsi dan perdagangan di tingkat lokal. Pembangunan ekonomi lokal merupakan suatu proses dimana masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta bekerja sama untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja, dengan tujuan untuk membangun kapasitas ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. populasi. masyarakat.

Potensi ekonomi lokal dapat dipahami sebagai kemampuan ekonomi desa setempat yang dapat dikembangkan dan terus berkembang serta menjadi sumber penelitian bagi masyarakat sekitar bahkan dapat mempengaruhi pendekatan ekonomi desa secara keseluruhan untuk pengembangan lebih lanjut. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan tumpuan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu peranannya dalam pembangunan perekonomian nasional sangatlah penting, karena memperluas kesempatan kerja dan memperluas pelayanan ekonomi kepada masyarakat berperan egaliter dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mencapai stabilitas bangsa. ,

Pemberdayaan UMKM merupakan pilihan strategis untuk mengangkat kelompok berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan keterampilan manajemen usaha. (Windusancono, 2021).

Pembangunan ekonomi nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat merupakan subjek utama dalam proses pembangunan, sedangkan Pemerintahlah yang mengarahkan, membimbing dan menyediakan sarana pendukung. Mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah penduduk yang dinamis merupakan solusi yang tidak dapat ditunda lagi, karena penduduk merupakan aset berharga Bangsa dan Negara. Pengembangan masyarakat mandiri merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan observasi awal ditemukan permasalahan yaitu pemerintah desa Salumaka kurang memperhatikan kondisi perekonomian setempat dan usaha mikro, kecil dan menengah dimana sejumlah UMKM berada terbelengkalai sehingga industri ini terancam punah. . pekerjaan.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka kajian terkait pembangunan ekonomi lokal perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian bertajuk Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal melalui UMKM di Desa Salumaka.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar pengukuran yang telah ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan data selengkap mungkin tentang orang, kondisi, atau gejala lainnya. (Hasan et al., 2022).

Lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. Masa penelitian akan berlangsung pada bulan Februari hingga Maret 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pemerintah Sebagai Motivator di desa Salumaka.

Pemerintah berperan dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan sejumlah strategi dan tindakan. Pemerintah memberikan dukungan pemulihan modal usaha kepada UMKM melalui program seperti Program Pendukung Manufaktur Usaha Mikro (BPUM) Pemerintah Pusat. Program ini memungkinkan UMKM untuk mengajukan dan menerima dukungan permodalan yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usahanya.

UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia, sehingga harus mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi, sekalipun

dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, mereka dapat diandalkan. Pemerintah menyadari sepenuhnya potensi yang dapat diciptakan oleh UMKM, oleh karena itu pemerintah mencanangkan beberapa program yang menunjukkan dukungannya terhadap pertumbuhan UMKM dengan tujuan untuk menghidupkan kembali UMKM ke kondisi normal, seperti kemudahan perizinan berusaha, perluasan ruang partisipasi dan pemasaran ke khalayak luas, dll. (Laksmi & Arjawa, 2023).

Selanjutnya, pemerintah juga merancang kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada UMKM agar tidak dikuasai oleh perusahaan besar. Pemerintah juga melakukan transformasi digital pada UMKM agar jarak dan waktu tidak menghambat komunikasi antara konsumen dan produsen. Ketika UMKM ingin berdiri, pemerintah memfasilitasi penyederhanaan prosedur perizinan, kemudian bagi usaha mikro, pemerintah akan membebaskan biaya perizinan dan kemudian membebaskan biaya izin bagi usaha ultra kecil dan kecil (UMK).

Peran inovator adalah kemampuan menerjemahkan program pembangunan daerah ke dalam bahasa yang sederhana dan menggugah keinginan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dari data yang tersaji di lapangan, program desa tersebut antara lain: program pembangunan jalan, pembangunan perumahan, penyediaan sarana air minum. Sebagai agen inovasi, pemerintah desa dapat memikirkan dan mencermati perubahan secara tepat untuk mendorong perubahan di desa. memainkan peran yang berbeda secara bersamaan. Agar efektif, pemerintahan desa harus memiliki legalitas yang tinggi agar masyarakat lebih mudah menyerap dan menerimanya serta mempercepat perubahan yang diinginkan. Tindakan inovatif diperlukan untuk masyarakat kreatif dengan perspektif koheren yang didukung oleh lingkungan inovatif.

Selanjutnya peran penggerak pemerintah desa adalah mendorong partisipasi masyarakat apabila terdapat hambatan dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga momentum pembangunan desa. Pemerintah berperan dalam menciptakan program-program yang memenuhi aspirasi masyarakat. Program yang selaras dengan aspirasi masyarakat akan menimbulkan semangat baru masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Pemerintah desa selalu mendorong kami sebagai masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam pembangunan pengelolaan desa. tentang pengawasan masyarakat berupa pemantauan pelaksanaan program infrastruktur desa. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan betapa besarnya peran pemerintah di Desa Salumaka dalam menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat. Insentif yang ditawarkan pemerintah desa Salumaka dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur.

3.3 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator di desa Salumaka

Sebagai fasilitator, fungsi pemerintah adalah membantu UMKM mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya, jika UMKM menemui kendala saat produksi, maka pemerintah bertanggung jawab memberikan pelatihan. Di sisi keuangan, sebagai fasilitator, pemerintah berperan membantu UMKM mendapatkan permodalan.

Meskipun program ini sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan. Pemerintah atau pelaku UMKM perlu menyosialisasikan fitur Ayo Rangkul kepada masyarakat karena masih banyak yang belum melakukannya. tahu tentang fitur ini.

Kajian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah secara umum adalah memperluas pemasaran produk, namun tidak mencakup kualitas produk dan meningkatkan jangkauan pemasaran melalui media online dan e-commerce. Perlunya penguatan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk dan mendorong optimalisasi pemasaran, termasuk membangun keterampilan dan kapasitas melalui pelatihan e-marketing dan perdagangan digital. Hal ini juga akan meningkatkan keberlanjutan UMKM yang ada dan berkembang. Peran pemerintah dalam hal ini dapat mencakup peningkatan standardisasi produk serta inovasi produk untuk membantu UMKM tumbuh menjadi lebih inovatif.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Peran adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang dipegangnya. Meskipun setiap tindakan mewakili peran berdasarkan status yang dipegang, namun tetap dalam urutan yang berbeda, sehingga hasil dari peran tersebut berbeda untuk setiap orang. (Rosmiati & Sopyan, 2024).

Dalam pelaksanaan program, pendukung program menghadapi kendala tertentu. Kendala tersebut antara lain adalah adanya instruksi kepada UMKM untuk mempromosikan produknya karena nasabah UMKM belum memahami cara penggunaan perangkat tersebut bahkan ada yang tidak memilikinya. Pasalnya, nasabah UMKM, terutama yang berusia lanjut, kurang mengetahui perkembangan teknologi dan merasa risih dengan fitur-fitur teknologi yang dinilai rumit. Selain itu, resistensi terhadap teknologi juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan terhadap keamanan dan manfaat teknologi. Beberapa UMKM mungkin khawatir mengenai keamanan data atau tidak yakin mengenai manfaat nyata yang dapat diperoleh dari penerapan teknologi. Mereka mungkin merasa bahwa metode tradisional telah berhasil sejauh ini dan merasa tidak perlu beralih ke era digital.

Kendala selanjutnya adalah tidak mempunyai buku bisnis, karena instruktur pendamping membutuhkan buku bekal. Memang, mempromosikan produk di jejaring sosial seperti Shopee membutuhkan sejumlah produk yang ingin dijual. Oleh karena itu, instruktur pendamping wajib melaporkan hambatan-hambatan tersebut kepada masing-masing pembimbing instruktur pendamping. Solusi yang ditawarkan konsultan adalah klien harus melakukan akuntansi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengembangan.

Jika klien mempunyai masalah atau merasa terbebani, maka instruktur yang mendampinginya harus siap membantu.

Pemerintah menciptakan program-program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mampu membangkitkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan desa kerajinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Proyek baru otonomi daerah memuat semangat partisipasi masyarakat, menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, sehingga tentunya segala aspirasi masyarakat harus hadir sejak muda (Abe, 2005: 123). Pemberlakuan undang-undang no. Perpres Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana otonomi dan desentralisasi dapat menciptakan partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara juga harus ada karena masyarakat adalah pemilik kedaulatan, masyarakat sebagai pembayar pajak, dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Selain itu, program yang dikembangkan dan dilaksanakan secara partisipatif juga memberikan peluang langsung bagi masyarakat untuk merencanakan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, melaksanakannya sendiri, dan memperoleh manfaat dari program yang dilaksanakan. Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur proses tersebut. (Syaeba, 2017).

Sementara itu, peran pemerintah desa sebagai fasilitator ditunjukkan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang mempertemukan beragam kepentingan masyarakat dalam optimalisasi pembangunan desa. Sebagai fasilitator, pemerintah desa bergerak di bidang dukungan melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, serta di bidang permodalan dengan memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat yang diberikan izin. Berdasarkan hasil penelitian, peran pendukung desa menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pemberian modal melalui program PNPB Perdesaan, khususnya penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di desa ini. pendidikan. Di bidang ini pemerintah desa membangun sekolah, dan di bidang ekonomi kami selalu mengikuti berbagai pelatihan yang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu, dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, yaitu: faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dibahas berasal dari rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, yakni banyaknya aset yang dimiliki masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat mengakibatkan minimnya partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Salumaka. Semakin tinggi tingkat pendapatan individu maka semakin tinggi

pula tingkat partisipasinya. Partisipasi dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan berupa uang dan barang. Orang yang mampu menyumbangkan materi berupa uang dan barang menunjukkan bahwa penghasilannya lebih dari cukup. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan desa menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melahirkan gagasan program desa. Data demografi menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat desa sangat rendah. Faktanya, mayoritas masyarakat mempunyai tingkat pendidikan hanya setara dengan sekolah dasar. Oleh karena itu, dalam musyawarah desa, masyarakat jarang sekali memberikan pendapat dalam bentuk usulan. Mereka puas hadir tanpa mengomentari program desa. Masyarakat yang berpendidikan tinggi seringkali lebih tertarik pada kegiatan pembangunan berbasis masyarakat dan dipimpin oleh pemerintah. Perkembangan berupa ide/pemikiran ditunjukkan oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi. Terkait partisipasi dalam pembangunan, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

3.2 Peran pemerintah desa sebagai Mobilisator.

Pemerintah desa berperan sebagai penggerak dan insentif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur. Mereka menggerakkan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah spesifik dalam pembangunan desa seperti gotong royong, perbaikan tempat ibadah, dan perbaikan tempat umum lainnya. Selain itu, pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mereka mengerahkan sumber daya manusia dan sumber daya lokal lainnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Sebagai penggerak, artinya pemerintah desa sebagai penggerak mempunyai peran menggerakkan atau mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemajuan pembangunan demi kebaikan bersama. Menurut teori Suhardono (2016), peran pemerintah desa adalah sebagai penggerak. Peran pemerintah desa sebagai penggerak berarti bahwa mereka bertindak sebagai motivator dan pemungkin peningkatan kapasitas sosial, inovasi, penggunaan teknologi dan konsep pemberdayaan dengan digabungkan. Peran ini juga mencakup penanganan keluhan masyarakat dan mendorong perubahan.

Data yang peneliti peroleh mengenai peran pemerintah desa sebagai penggerak menunjukkan bahwa pemerintah desa Salumaka selalu mengerahkan masyarakat dan sumber daya lokal lainnya untuk pembangunan guna mendukung infrastruktur

masyarakat akar rumput yang berdampak pada pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Pemerintah Desa Salumaka selalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Salumaka, masyarakat selalu membantu dan bahu membahu, terutama pada saat pembangunan jalan di kawasan Kalihurip. Masyarakat desa Salumaka bersatu membangun jalan ini untuk memperlancar mobilitas ekonomi mereka. Dan melalui kerjasama bersama dalam pembangunan tersebut, masyarakat desa dan pemerintah desa Salumaka telah berhasil mengentaskan kemiskinan setiap tahunnya.

Dalam teorinya, Suhardono menjelaskan bahwa peran mobilisasi pemerintah desa berarti kemampuan menetapkan arah dan standar yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai penggerak, pemerintah desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hal ini termasuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan tujuan menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, peran advokasi pemerintah desa menjadi penting dalam menciptakan kerangka di mana pembangunan mempunyai dampak yang memadai terhadap infrastruktur untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa.

4. SIMPULAN

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pengembangan UMKM di pedesaan. Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang mendukung, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, memberikan pelatihan dan dukungan serta mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan UMKM di pedesaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di atas, disimpulkan bahwa di Desa Salumaka, pemerintah telah memberikan motivasi kepada para pemangku UMKM, memberikan dukungan dan bimbingan kepada para pemangku UMKM dalam mengelola UMKM di desa tersebut. Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa pemerintah belum mengambil langkah optimal dalam menjadi pemberdayaan UMKM. Pemerintah juga harus menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi entitas ekonomi untuk mengakses layanan informasi dan izin impor dan ekspor barang dengan memberikan fasilitas dan memberikan informasi tentang peluang pasar dan peraturan serta peraturan pajak keluar dari negara tempat barang tersebut tiba melalui lembaga Kementerian. Keuangan. Peran pemerintah sebagai penggerak dalam pengembangan UMKM mencakup upaya menggerakkan dan menggali dukungan dari berbagai pihak terhadap pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz, H. U. P., Canaldhy, R. S., & Kencana, N. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal Pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas Kabupaten Muara Enim). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(2). Semarang, 18(2), 32.
- Hasan, M., Hasibuan, S., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., Mattunruang, A. A., Nursaeni, Silalahi, D. E., Harahap, T. K., & Rodliyah, I. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Analisis Kinerja Dan Strategi Pengembangan Umkm Alas Kaki Di Desa Pagelaran. *Jurnal Benefita*, 4(3), 435.
- Komalasari, N. D., Puspaningtyas, A., & Widodo, J. (2022). Pengembangan Umkm Sentra Kuliner Desa Pekarungan Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 6(1), 35.
- Laksmi, P. A. S., & Arjawa, I. G. W. (2023). Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543*, 4(3), 12–21.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal Of Applied Business And Economic)*, 9(2), 184.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Rosmiati, N., & Sopyan, I. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perkembangan Umkm Masyarakat Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 2(3), 61–68.
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). The Role Of Local Governments In The Development Of Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143.
- Syaeba, M. (2017). PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI KERJA GURU DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP KEDISIPLINAN SISWA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU*, 13(1), 43–56.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG*